

## DAFTAR PUSTAKA

- Adisasmita, R. (2011). *Pengelolaan Pendapatan dan Anggaran Daerah*. Yogyakarta: Graha Ilmu.
- Brotodihardjo, R. (2003). *Pengantar Ilmu Hukum Pajak*. Bandung: PT. Refika Aditama.
- Bupati, 2001. *Peraturan Daerah Nomor 4 Tahun 2001 Tentang Pembangunan, Penghapusan, dan PemekaranKecamatan dan Kelurahan dalam Kota Bandar Lampung*. Sekretariat Kota Bandar Lampung. Jakarta.
- Bupati, 2012. *Peraturan Derah Nomor 4 Tahun 2012 Tentang Penataan dan Pembentukan Kelurahan dan Kecamatan*. Sekretariat Kota Bandar Lampung. Jakarta.
- Erly, S. (2005). *Hukum Pajak, Edisi Ketiga*. Jakata: Salemba Empat.
- Hadimoeldjono , B. (2013). *Pengendalian Pemanfaatan Ruang: Mencari Kelembagaan Pemanfaatan Ruang yang Efektif dalam Buletin Tata Ruang dan Pertanahan. Edisi II* . Jakarta: Direktorat Tata Ruang dan Pertanahan, BAPPENAS.
- Hidayati, W., & Harjanto, B. (2003). *Konsep Dasar Penilaian Properti Edisi Pertama*. Yogyakarta: BPF.
- Indarto, K. D., & Rahayu, S. (2015). Dampak Pembangunan Perumahan Terhadap Kondisi Lingkungan, Sosial dan Ekonomi Masyarakat Sekitar Di Kelurahan Sambiroto, Kecamatan Tembalang. *Jurnal Teknik PWK*, 3-4.
- Jayadinata, J. (1999). *Tata Guna Tanah Dalam Perencanaan Perdesaan, Perkotaan dan Wilayah*. Bandung: ITB Press.
- Joko, P. (2008). *Metode Penentuan Disinsentif Pajak Bumi dan Bangunan Berdasarkan Penyimpangan Pemanfaatan Objek Pajak Terhadap Rencana Tata Ruang*. Jakarta: PT Gramedia Pustaka Utama.
- Karim, I., & Ariastitas, P. G. (2016). Penentuan Nilai Insentif dan Disinsentif Pada Pajak Bumi dan Bangunan Sebagai Instrumen Pengendalian Alih Fungsi Lahan Pertanian di Sidoarjo. *Jurnal Sains dan Seni ITS*, 1-5.
- Kecamatan Kemiling dalam Angka Tahun 2018*, Badan Pusat Statistik Kota Bandar Lampung, 2018.
- Kota Bandar Lampung dalam Angka Tahun 2018*, Badan Pusat Statistik Kota Bandar Lampung, 2018
- Mahmudi. (2007). *Manajemen Kinerja Sektor Publik*. Yogyakarta: UPP STIM YKPN.

- Mardiasmo. (2005). *Akuntansi Sektor Publik. Edisi 2*. Yogyakarta: Penerbit Andi.
- Menteri Keuangan. 2014. *Keputusan Menteri Keuangan Nomor 150/PWK.03/1010 Tentang Klasifikasi dan Penetapan Nilai Jual Objek Pajak Sebagai Dasar Pengenaan Pajak Bumi dan Bangunan..* Sekretarian Kementerian Keuangan. Jakarta.
- Menteri Agraria dan Tata Ruang. 2015. *Peraturan Menteri Agraria dan Tata Ruang Nomor 5 Tahun 2015 Tentang Izin Lokasi*. Sekretarian Agraria dan Tata Ruang. Jakarta.
- Nofitri, E. (2018). *Prioritas Bentuk Inseftif dan Disinsentif Kampung Majapahit Kecamatan Trowulan*. Malang: Perpustakaan Pusar UNBRAW.
- Rencana Tata Ruang Wilayah dan Kota Tahun 2011-2030*, Badan Perencanaan dan Pembangunan Daerah Kota Bandar Lampung, 2010.
- Ridwan, J. (2013). *Hukum Tata Ruang Dalam Konsep Kebijakan Otonomi Daerah*. Bandung: Nuansa.
- Sadahiro, Y. . (2006). *Spatial Analysis using GIS*. Japan: University of Tokyo.
- Sari, D. F. (2014). *Pengendalian Pemanfaatan Ruang Melalui Instrumen Insentif dan Disinsentif Pada Kawasan Industri Kecamatan Lubuk Begalung Kota Padang*. Padang: Perpustakaan Pusat UNAND.
- Siahaan, M. (2010). *Pajak dan Retribusi Daerah*. Jakarta: PT. Raja Grafindo Persada.
- Soemitro, R. (1989). *Pajak Bumi dan Bangunan*. Bandung: PT. Eresco.
- Sugiyono. (2012). *Metode Penelitian Kuantitatif Kualitatif dan R&D*. Bandung: Alfabeta.
- Suharno. (2003). *Pengelolaan Pajak Bumi & Bangunan Dalam Era Otonomi Daerah*. Jakarta: Direktorat PBB dan BPHTB.
- Sujadi. (2003). *Penelitian dan Pengembangan atau Research and Development (R&D)*. Jakarta: Rineka Cipta.
- Susanto, R. K. (2015). *Nilai Lahan Sebagai Dasar Nilai Jual Objek Pajak (NJOP) Bumi Menurut Aspek Ekonomi dan Lingkungan Di Kecamatan Sewon Kabupaten Bantul*. Yogyakarta, Tesis. Program S2 Geografi Universitas Gadjah Mada (UGM): Perpustakaan Pusat UGM.
- Pemerintah Indonesia. 2007. *Undang-Undang Republik Indonesia Nomor 26 Tahun 2007 Tentang Penataan Ruang*. Sekretariat Negara. Jakarta.
- Pemerintah Indonesia. 2009. *Undang-Undang Republik Indonesia Nomor 28 Tahun 2009 Tentang Pajak Daerah dan Retribusi Daerah*. Sekretariat Negara. Jakarta.

- Pemerintah Indonesia. 1994. *Undang-Undang Republik Indonesia Nomor 12 Tahun 1994 Tentang Pajak Bumi dan Bangunan*. Sekretariat Negara. Jakarta.
- Presiden. 2014. *Peraturan Presiden Nomor 165 Tahun 2014 Tentang Penataan dan Fungsi Kabinet Kerja*. Kesekretariatan Kepresidenan. Jakarta.
- Walikota. 2011. *Peraturan Daerah Kota Bandar Lampung Nomor 01 Tahun 2011 Tentang Pajak Daerah*. Kesektariatan Pemerintah Daerah. Bandar Lampung.

*(Halaman ini sengaja di kosongkan)*

**LAMPIRAN A**  
**PERANGKAT SURVEY**